



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2023

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - b. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - d. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - e. Renja . . .

- e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023;
- f. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- g. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023;
- h. Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023;
- i. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023;
- j. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023;
- k. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023;
- l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023;
- m. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023;
- n. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023;
- o. Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- p. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023;
- q. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023;
- r. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2023;
- s. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023;
- t. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023;
- u. Renja . . .

- u. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023;
- v. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- w. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- x. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- y. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- z. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023;
- aa. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023;
- bb. Renja Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023;
- cc. Renja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023;
- dd. Renja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023;
- ee. Renja Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023;
- ff. Renja Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023;
- gg. Renja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023;
- hh. Renja Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023;
- ii. Renja Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023;
- jj. Renja Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023;
- kk. Renja Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023;
- ll. Renja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023;
- mm. Renja . . .

- mm. Renja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - nn. Renja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - oo. Renja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - pp. Renja Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - qq. Renja Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - rr. Renja Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - ss. Renja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - tt. Renja Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - uu. Renja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023;
 - vv. Renja Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023; dan
 - ww. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023.
- (3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2023.

**RENCANA KERJA KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, kebutuhan anggaran indikatif dan prakiraan maju setahun berikutnya sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tambakromo Tahun 2023-2026, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Dalam proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang melibatkan elemen-elemen masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Sementara itu, dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Pati Tahun 2023. Disamping itu, diarahkan juga pada dukungan

pembangunan daerah terhadap prioritas dan target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan target serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sejalan dan mengikuti tahapan dalam penyusunan RKPD dengan detail program kegiatan yang terinput dalam aplikasi SIPD Kemendagri.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra Kecamatan Tambakromo Tahun 2023-2026 dimana dalam proses penyusunannya masih dalam suasana penanganan pandemi COVID 19, sekaligus pemulihan kondisi masyarakat dengan penerapan pola kebiasaan baru, sehingga diharapkan mampu melakukan formulasi dan adaptasi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan jaring pengaman sosial serta penguatan kesehatan masyarakat maupun perorangan. Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 dan selanjutnya menjadi RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan program dan prioritas kegiatan dari Rencana Strategis Kecamatan Tambakromo ke dalam operasional program kegiatan Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo tahun 2023 adalah :

- a. Sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan wewenang, peran dan tugas fungsinya.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Maksud dan Tujuan
		1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
		3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
		3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas Pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakromo tahun-tahun sebelumnya harus dilakukan dalam kerangka untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tambakromo yang telah disusun dalam Implementasi pelaksanaannya tidak secara keseluruhan dapat terakomodasi dalam pelaksanaan APBD tahun berkenaan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan anggaran serta perubahan pagu anggaran pada saat tahun pelaksanaan sehingga berdampak pada realisasi atas target program dan kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah.

Faktor- Faktor Penyebab keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain : adanya ketersediaan alokasi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal perencanaan, evaluasi secara periodik atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi target program dan kegiatan antara lain : keterbatasan droping alokasi anggaran sehingga berdampak pada prioritas pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan dari institusi yang lebih tinggi, serta kualitas serta kuantitas SDM yang kurang memadai.

Secara umum evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakromo serta pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam *tabel 2.1*. Tabel tersebut menyajikan Program dan Kegiatan yang mencapai target yang ditetapkan maupun yang tidak mencapai target perencanaan serta yang belum dilaksanakan berkaitan keterbatasan pengalokasian anggaran.

Dari *tabel 2.1* tersebut secara garis besar dapat dijelaskan bahwa di tahun 2022 kegiatan yang belum bisa mencapai target adalah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dimana capaiannya hanya 61%. Hal ini disebabkan target sebanyak 18 desa dengan capaian sebanyak 11 Desa

berdasarkan indikator kinerja jumlah desa yang telah menyusun data monografi.

Sedangkan program kegiatan lainnya sudah bisa mencapai target, dengan tingkat realisasi capaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dan ditampilkan *lewat tabel 2.1*.

Kebijakan yang diambil agar di tahun berikutnya semua program dan kegiatan bisa mencapai target adalah dengan mematangkan proses perencanaan, dengan lebih mempersiapkan ketersediaan data-data yang akurat dan valid setiap tahunnya, sehingga kesalahan analisa kebutuhan bisa diminimalkan.

Kebijakan penganggaran juga harus diperhatikan disamping perencanaan. Karena perencanaan tanpa penganggaran tidak akan bisa terlaksana, begitupun sebaliknya. Selama ini besarnya pagu anggaran untuk Perangkat Daerah Kecamatan sering tidak sesuai dengan perencanaan awal yang dituangkan dalam penyusunan renja, sehingga terpaksa realisasinya harus disesuaikan kembali dengan pagu anggaran yang ada. Untuk kedepannya diharapkan agar penetapan pagu anggaran tidak berubah-ubah, sehingga rencana penganggaran awal tidak mengalami perubahan, yang secara otomatis realisasi capaian kinerja program kegiatan juga tidak akan melenceng jauh dari target kinerja program kegiatan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tambakromo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	60	100
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60	36	12	12	100	12	30	100
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	30	18	6	6	100	6	5	100
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	5	3	1	1	100	1	5	100

7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	5	3	1	1	100	1	60	100
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	60	36	12	12	100	12	20	66,7
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	30	18	1	1	100	1	60	100
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun selama setahun	297	183	75	75	100	75	333	112
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28	-	14	14	100	14	28	100
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	24	-	12	12	100	12	24	100
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180	144	36	36	100	36	216	120
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun	5	3	1	1	100	1	5	100
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun selama setahun	60	36	12	12	100	12	60	100
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang disusun selama setahun	60	36	12	12	100	12	60	100

7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120	72	24	24	100	24	120	100
7 01 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun selama setahun	60	36	12	12	100	12	60	100
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48	24	12	12	100	12	48	100
7 01 01	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun selama setahun	60	36	12	3	25	12	51	85
7 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun.	1.010	643	87	87	100	87	817	80,891 1
7 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun.	24	4	6	6	100	6	16	66,666 7
7 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama setahun.	24.900	14.836	4.723	4.723	100	4.723	24282	97,5
7 01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan penjilidan selama setahun	172.215	46.168	20.040	20.040	100	20.040	86248	50
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun.	120	60	12	12	100	12	84	70

7 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah selama setahun.	2.296	1.041	290	290	100	290	1621	70,6
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis	14	-	7	7	100	7	14	100
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah layanan publik berbasis e-gov	2	-	1	1	100	1	2	100
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan yang disusun selama setahun	60	36	12	3	100	12	60	100
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun.	2.423	1.650	325	325	100	325	2300	94,9
7 01 01 2.08 09	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama setahun.	300	168	36	36	100	36	240	80
7 01 01 2.08 10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	192	72	12	12	100	12	96	50
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun selama setahun	60	36	12	3	25	12	51	85
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	236	98	11	11	100	11	120	51
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana gedung	68	32	13	13	100	13	58	85,2

7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100	100	100	100	100	100	300	100
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pengajuan ijin paten yang terlayani	440	356	100	33	33	100	489	100
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	28.500	13.278	4.800	4.800	100	4.800	22878	80
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah izin yang dikeluarkan	440	356	100	154	154	100	610	138
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Desa yang aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	90	54	18	18	100	18	90	100
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	10	6	2	2	100	2	10	100
7 01 03 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	36	12	12	100	12	60	100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio linmas	0,035	0,033	0,034	0,034	100	0,034	0,067	100

7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan linmas	90	54	18	18	100	18	72	80
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	60	36	12	12	100	12	48	80
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase keterisian data monografi Kecamatan	86	82	85	85	100	85	252	293
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mengisi data monografi secara lengkap	90	54	18	7	39	18	79	88
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen data Kecamatan (profil dan monografi) yang disusun selama setahun	10	6	2	2	100	2	10	100
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun selama setahun	90	54	18	18	100	18	90	100

Sumber: Kecamatan Tambakromo; 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tambakromo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Kriminalitas pada tahun 2021, target sebesar 3,35 dengan capaian sebesar 1,16; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah memenuhi target bahkan jauh melebihi, hal ini dikarenakan makin intensnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh pihak terkait.
2. Persentase Pos Kampling Aktif pada tahun 2021, target sebesar 63% dengan capaian sebesar 65%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah memenuhi target dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat poskamling.
3. Persentase Anggota Linmas Aktif pada tahun 2021, target sebesar 70% dengan capaian sebesar 70%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi/di atas target. Dikarenakan intens nya sosialisasi dan pembekalan yan dilaksanakan pihak terkait.
4. Rasio Poskamling Aktif pada tahun 2021, target sebesar 4,8 dengan capaian sebesar 4,9; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
5. Rasio Anggota Linmas aktif pada tahun 2021, target sebesar 0,033 dengan capaian sebesar 0,035; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
6. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berprestasi pada tahun 2021, target sebesar 55% dengan capaian sebesar 50%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi di bawah target.
7. Untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berprestasi masih di bawah target disebabkan karena banyaknya lembaga kemasyarakatan yang belum memaksimalkan tupoksinya untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada lembaga tersebut.
8. Persentase Bantuan Sosial yang Disalurkan Kepada Masyarakat pada tahun 2021, target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
9. Persentase Usulan Masyarakat yang Masuk Dalam APBD Kabupaten pada tahun 2021, target sebesar 9% dengan capaian sebesar 9%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai/sama dengan target.

10. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif pada tahun 2021, target sebesar 60% dengan capaian sebesar 60%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
11. Persentase LPMD Aktif pada Tahun 2021 target sebesar 60 % dengan capaian sebesar 61 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
12. Persentase PKK Aktif pada Tahun 2021 target sebesar 86 % dengan capaian sebesar 88 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
13. Persentase Karang Taruna Aktif pada Tahun 2021 target sebesar 58 % dengan capaian sebesar 58 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
14. Persentase RT / RW Aktif pada Tahun 2021 target sebesar 78 % dengan capaian sebesar 80 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
15. Persentase Posyandu Aktif pada Tahun 2021 target sebesar 83 % dengan capaian sebesar 85 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
16. Persentase Total Ketercapaian Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat (Rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021, target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai target.
17. Persentase penyaluran Rastra, pada Tahun 2021 target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 100 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
18. Persentase penyaluran PKH, pada Tahun 2021 target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 100 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
19. Persentase penyaluran Bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir, dll), pada Tahun 2021 target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 100 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
20. Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten pada tahun 2021, target sebesar 9% dengan capaian sebesar 9%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai atau sama dengan target.

21. Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa, pada tahun 2021 target sebesar 78% dengan capaian sebesar 79%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
22. Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan, pada tahun 2021 target sebesar 87% dengan capaian sebesar 88%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
23. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021, target sebesar 70% dengan capaian sebesar 79,26%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi jauh melebihi target.
24. Persentase Realisasi Capaian RKPDes pada tahun 2021, target sebesar 75% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi jauh melebihi target.
25. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu, pada tahun 2021 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai atau sama dengan target.
26. Persentase pelayanan perijinan yang tepat waktu, pada tahun 2021 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai atau sama dengan target.
27. Persentase pelayanan perijinan yang terlayani, pada tahun 2021 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai atau sama dengan target.
28. Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani, pada tahun 2021 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai atau sama dengan target.
29. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan, pada tahun 2021 target sebesar 70% dengan capaian sebesar 82%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
30. Persentase keterisian data monografi kecamatan, pada tahun 2021 target sebesar 82% dengan capaian sebesar 82%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.
31. Persentase keterisian data profil kecamatan, pada tahun 2021 target sebesar 65% dengan capaian sebesar 82%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target.

32. Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib, pada tahun 2021 target sebesar 91% dengan capaian sebesar 94%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target.
33. Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu, pada tahun 2021 target sebesar 93% dengan capaian sebesar 94%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target.
34. Persentase laporan keuangan desa yang sesuai standar pelaporan, pada tahun 2021 target sebesar 81% dengan capaian sebesar 89%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi dari target.

Untuk lebih jelasnya analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tambakromo ini akan disajikan dalam *tabel 2.2* tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tambakromo.

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	Persentase LPMD aktif			Persen	70	75	-	-	65	65	-	-	
	Persentase PKK desaaktif			Persen	88	90	-	-	88	88	-	-	
	Persentase Karang Taruna aktif			Persen	60	65	-	-	60	60	-	-	
	Persentase RT/RW aktif			Persen	79	80	-	-	80	80	-	-	
	Persentase Posyandu aktif			Persen	87	90	-	-	85	85	-	-	
2.2	INDIKATOR SASARAN 2												
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH danbantuankeagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1												
	Persentase penyaluran rastra			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
	Persentase penyaluran PKH			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
2.3	INDIKATOR SASARAN 3												
	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten			Persen	11	12	-	-	10	10	-	-	
2.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1												
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa			Persen	80	82	-	-	80	80	-	-	

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan			Persen	90	92	-	-	90	90	-	-	16
3	INDIKATOR TUJUAN 3												
	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan			Persen	75	80	-	-	82	82	-	-	
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes			Persen	80	85	-	-	100	100	-	-	
3.1	INDIKATOR SASARAN 1												
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1												
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
3.1.2	INDIKATOR PROGRAM 2												
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani			Persen	100	100	-	-	100	100	-	-	
3.2	INDIKATOR SASARAN 2												
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan			Persen	65	75	-	-	78	78	-	-	
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 1												
	Persentase keterisian data monografi kecamatan			Persen	80	84	-	-	78	78	-	-	

No	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan			Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	
2.1.2	Sasaran Program 2:												
	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya			Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	
2.1.3	Sasaran Program 3:												
	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan			Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	
2.1.4	Sasaran Program 4:												
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu			Persen	-	-	100	100	-	-	100	100	

Sumber: Kecamatan Tambakromo; 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu strategis RKPD Kabupaten Pati tahun 2023 didapatkan dari pemetaan permasalahan per urusan, Capaian Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), Arah kebijakan RPJMD untuk tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023, serta RKPN 2023. Adapun isu strategis RKPD yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Ekonomi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Penurunan kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat
- c. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia
- d. Peningkatan tata kelola pemerintah melalui penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik;

Dari perumusan Isu-isu tersebut di atas, Kecamatan termasuk dalam Isu RKPD yang ke empat. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penunjang penting dalam pencapaian target pembangunan, mengingat kecamatan mempunyai peran penting dalam hal koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan yang langsung memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tayu sebagai Perangkat Daerah, ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pati;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- 3) Pelayanan prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pati yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:
 - a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
 - b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;

Berdasar identifikasi permasalahan di atas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah sebagaimana dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati periode 2023-2026, sebagai salah satu OPD yang melaksanakan pelayanan publik dilakukan melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan PATEN dan pelayanan publik lain di kecamatan secara transparan, responsif, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang sudah baik;
- b. Pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik.

Sedangkan yang merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan yang masih kurang memadai;
- b. Anggaran di Kecamatan yang masih kurang maksimal serta sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang representatif.
- c. Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan tugas fungsi kecamatan, maka dalam penyusunan program dan kegiatan yang bersifat teknis dan pelayanan perlu dialokasikan pagu anggaran yang memadai.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b) Program prioritas pembangunan daerah; dan
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo berdasarkan RKPD Kabupaten Pati, sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se Kabupaten Pati yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tambakromo.

Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 sama dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambakromo tahun 2023.

Secara lebih detail review terhadap rancangan awal RKPD ini akan disajikan dalam *tabel 2.4*, yang berisikan tentang program/kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal Renja 2023, dan program/kegiatan yang sesuai dengan analisis kebutuhan di tahun 2023.

Tabel 2..4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Tambakromo

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tambakromo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tambak romo	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100 %	2.296.357,2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kec. Tambakro mo	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100 %	2.236.199, 4	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	19 dokumen	3.686	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambakr omo	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	19 dokumen	3.702,75	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.108	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.113,8	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	645	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec. Tambakr omo	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	646,1	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	510	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	519,6	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	720	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	720	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	703	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambakro mo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	703,25	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Prosentase tersusunnya Dokumen Adminstrasi Keuangan.	100 %	1.894.287	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tambakr omo	Prosentase tersusunnya Dokumen Adminstrasi Keuangan.	100 %	1.919.818	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambak romo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	1.868.517	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambakro mo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	1.894.048	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.800	
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.486,6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	22.486,6	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	661,4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	661,4	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	12 Laporan	822	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	12 Laporan	822	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	12 Laporan	12.020	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tambakr omo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	12 Laporan	12.020	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.020	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.020	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitas.	17 orang	64.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tambakr omo	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitas.	17 orang	8.500	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tambak romo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	25.200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Tambakro mo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	8.500	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Tambak romo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	39.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Tambakro mo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tambak romo	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum.	100%	77.889,9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tambakro mo	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum.	100%	123.448	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tambak romo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.452	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tambakro mo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	2.452	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambak romo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambakro mo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.150	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tambak romo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	25.937	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tambakro mo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	30.216	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tambak romo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tambakro mo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.700	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.676,4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	39.600	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	83.010	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.250	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	1.824,5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	0	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah unit barang yang tersedia.	8 unit	82.983	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambakr omo	Jumlah unit barang yang tersedia.	8 unit	38.000	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambak romo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	26.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambakro mo	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	26.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambakromo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	56.983	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambakromo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	12.000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambakromo	Jumlah laporan Jasa Penunjang Kecamatan.	25 Laporan	110.151,3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambakromo	Jumlah laporan Jasa Penunjang Kecamatan.	25 Laporan	101.901,3	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.150	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.751,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	84.751,3	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambakromo	Terpeliharanya Barang milik Kecamatan.	33 unit	51.140	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tambakromo	Terpeliharanya Barang milik Kecamatan.	33 unit	28.809,35	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	16.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	19.769,35	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambakromo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.890	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambakromo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.040	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tambakromo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tambakromo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tambakromo	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100 %	4.044	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tambakromo	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100 %	3.063	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tambakromo	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan.	6000 orang	4.044	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tambakromo	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan.	6000 orang	3.063	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kec. Tambakromo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang	6000 dokumen	2.250	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Kec. Tambakromo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha	6000 dokumen	1.269	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Dilaksanakan			yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		yang Dilaksanakan			
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1.794	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	1.794	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tambakromo	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100 %	39.354,8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tambakromo	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100 %	18.833	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tambakromo	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.	18 desa	14.354,8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tambakromo	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.	18 desa	8.384,5	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambakromo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	4.859,8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambakromo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	6.439,5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	9.495	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1.945	
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec. Tambakromo	Jumlah desa yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM.	18 desa	15.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kec. Tambakromo	Jumlah desa yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM.	18 desa	0	
7 01 03 2.05 01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Tambakromo	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.	12 Dokumen	15.000	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kec. Tambakromo	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.	12 Dokumen	0	
7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tambakromo	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.	18 keluarga	10.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Tambakromo	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.	18 keluarga	10.448,5	
7 01 03 2.06 12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran	5000 Keluarga	10.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Kec. Tambakromo	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan	5000 Keluarga	10.448,5	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tambak romo	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100 %	10.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tambakromo	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100 %	1.432,6	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tambak romo	Jumlah konflik sosiadan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya.	1 Kejadian	10.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tambakromo	Jumlah konflik sosiadan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya.	1 Kejadian	1.432,6	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambakromo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.432,6	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tambak romo	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	24.321	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM	Kec. Tambakr omo	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraa n pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	46.956	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tambak romo	Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.	1 forum	24.321	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tambakr omo	Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraa n pemerintahan umum di Kecamatan.	1 forum	46.956	
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	24.321	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	46.956	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tambak romo	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	29.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA	Kec. Tambakro mo	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	1.845	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kec. Tambak romo	Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran	18 Desa	29.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kec. Tambakro mo	Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran	18 Desa	1.845	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.) (.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.) (.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pemerintahan Desa		dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.			Pemerintahan Desa		dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambak romo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	29.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambakro mo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Dokumen	1.845		
TOTAL					2.403.077						2.308.329	

Sumber: Kecamatan Tambakromo; 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan musrenbangdes dan musrenbang RKPD kecamatan, khususnya usulan program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan sudah masuk dalam rekapan usulan pada perangkat daerah terkait, sedangkan usulan program dan kegiatan melalui renja kecamatan sementara belum ada.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tambakromo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mempunyai mengusung tema **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** dengan Fokus; Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi ; dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah, kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 turut selaras dengan prioritas nasional utamanya yang ketujuh yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** di lingkup wilayah kecamatan. Dengan kondisi wilayah yang kondusif dan pelayanan publik yang baik, diharapkan dapat mendorong keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah **Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera**, dengan Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya sektor utama penopang perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penguatan sektor utama penopang perekonomian diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan di periode selanjutnya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, tentunya mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dalam dokumen renstra tahun 2023-2026 yang merupakan rencana strategis operasional kegiatan dalam kurun tahun 2023 sampai 2026, mempunyai tujuan **Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat** yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan sasaran:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kemandirian Desa;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tambakromo untuk tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

- 7 Unsur Kewilayahan
- 7.01 Kecamatan
- 7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha;
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- 1) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.
- 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 7.01.05.2.01 Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sedangkan untuk pendanaan dalam Renja ini bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 2.308.329.000,-.

Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan kerangka pendanaan Kecamatan Tambakromo Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tabakromo.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7											
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7	KECAMATAN				2.308.329				2.381.768		
7	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Kec. Tabakromo	100%	2.236.199			100%	2.287.442		
7	1	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	Kec. Tabakromo	19 dokumen	3.703		19 dokumen	3.789
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tabakromo	2 Dokumen	1.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	1.139
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Tabakromo	2 Dokumen	646	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	663

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Tambakromo	2 Dokumen	520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	524	
7	01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tambakromo	2 Laporan	720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	740	
7	01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tambakromo	2 Laporan	703	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	723	
7	1 1 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan.	Kec. Tambakromo	100%	1.919.818			100%	1.948.077	
7	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambakromo	22 Orang/bula	1.894.048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Orang/bulan	1.921.576	
7	01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tambakromo	12 Dokumen	1.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1.851	
7	01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tambakromo	12 Dokumen	22.487	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	23.125	
7	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tambakromo	2 Laporan	661,4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	680	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kec. Tambakromo	12 Laporan	822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	845	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Kec. Tambakromo	100%	12.020			100%	12.361	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tambakromo	12 Laporan	12.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	12.361	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitas.	Kec. Tambakromo	17 orang	8.500			26 orang	25.916	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tambakromo	18 Paket	8.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Paket	25.916	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum.	Kec. Tambakromo	100%	123.448			100%	76.941	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tambakromo	7 Paket	2.452	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	2.522	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tambakromo	4 Paket	2.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	1.491	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tambakromo	33 Paket	30.216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Paket	26.674	
7	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tambakromo	4 Paket	3.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	3.805	
7	01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tambakromo	12 Dokumen	1.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	1.724	
7	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambakromo	100 Laporan	83.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Laporan	40.725	
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang yang tersedia.	Kec. Tambakromo	8 unit	38.000			8 unit	85.339	
7	01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Tambakromo	1 Unit	26.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	26.738	
7	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tambakromo	7 Unit	12.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	58.601	
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Kecamatan.	Kec. Tambakromo	25 laporan	101.901			26 laporan	113.279	
7	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambakromo	12 Laporan	2.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2.057	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambakromo	12 Laporan	15.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	24.064	
7	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambakromo	12 Laporan	84.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	87.158	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Kecamatan.	Kec. Tambakromo	33 unit	28.809		33 unit	21.740	
7	01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Tambakromo	11 Unit	19.769	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Unit	16.711	
7	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tambakromo	5 Unit	9.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	5.029	
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Kec. Tambakromo	100%	3.063		100%	4.159	
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan.	Kec. Tambakromo	6000 orang	3.063		6000 orang	4.159	
7	01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Tambakromo	6000 Dokumen	1.269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6000 Dokumen	2.314	
7	01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Tambakromo	12 Laporan	1.794	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.845	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	01	03										
			PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kec. Tambakromo	100%	18.833		100%	25.047		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.	Kec. Tambakromo	18 desa	8.385		18 desa	14.763
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambakromo	3 lembaga	6.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 lembaga	4.998
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambakromo	5 Laporan	1.945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	9.765
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.	Kec. Tambakromo	18 keluarga	10.448,5		18 keluarga	10.284
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Tambakromo	18 keluarga	10.448,5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 keluarga	10.284
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kec. Tambakromo	100%	1.433		100%	10.284

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya.	Kec. Tambakromo	1 kejadian	1.433		1 kejadian	10.284	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambakromo	12 Laporan	1.433	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	10.284	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Kec. Tambakromo	100%	46.956		100%	25.012	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.	Kec. Tambakromo	4 forum	46.956		4 forum	25.012	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tambakromo	12 Dokumen	46.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	25.012	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Kec. Tambakromo	100%	1.845		100%	29.824	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.	Kec. Tambakromo	18 desa	1.845			18 desa	29.824	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambakromo	36 Dokumen	1.845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	29.824	
TOTAL									2.308.329				2.381.768	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 khususnya tahun 2023. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2023.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan renja perangkat daerah ini perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023. Diharapkan semua sumber daya perangkat daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001